

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu

1. **Eka Aulia Putri.(2021).“Implementasi Program Inovasi Desa Kabupaten Bengkalis (Studi di Kecamatan Pinggir)” – Universitas Islam Riau.** Menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi PID di Kecamatan Pinggir belum Baik. Permasalahan utama meliputi lemahnya komunikasi dan sosialisasi program kepada masyarakat, rendahnya kompetensi aparatur desa dalam manajemen dan pelaporan, administrasi yang tidak tertib, serta partisipasi masyarakat yang masih rendah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan implementasi PID dipengaruhi oleh efektivitas komunikasi, peningkatan kapasitas SDM, pengelolaan administrasi yang baik, dan pemberdayaan masyarakat.
2. **Mahdalina.(2022).“Implementasi Program Inovasi Desa Kecamatan Sungai Tabukan Kabupaten Hulu Sungai Utara” – STIA Amuntai.** Menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan 14 informan melalui teknik snowball sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi PID belum berjalan Baik. Dari sembilan indikator menurut teori Merilee S. Grindle, hanya lima yang sesuai, sementara empat indikator masih belum terpenuhi, terutama terkait pelaksana program, sumber daya, dan aktor yang terlibat. Faktor penghambat implementasi meli-

puti keterbatasan dana dan sumber daya manusia, sedangkan faktor pendukungnya adalah adanya dukungan dari para stakeholder.

Kedua penelitian tersebut memiliki kesamaan fokus, yakni mengkaji faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi Program Inovasi Desa. Namun, keduanya masih menempatkan kajian inovasi desa pada ranah pembangunan desa secara umum dan pemberdayaan masyarakat, sehingga belum menyentuh aspek spesifik seperti bidang kesehatan.

Oleh karena itu, penelitian ini hadir dengan keunikan tersendiri, yaitu mengkaji Implementasi Program Inovasi Desa (AKU SAYANG TEGAR) Sebagai Inovasi Sosial Dalam Menekan Angka Stunting di Desa Telaga Itar, Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong. Program AKU SAYANG TEGAR berfokus pada isu kesehatan ibu dan balita, terutama pencegahan stunting dan peningkatan gizi keluarga. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya melanjutkan temuan Rahmawati dan Mahdalina terkait faktor penghambat seperti rendahnya partisipasi masyarakat atau keterbatasan kapasitas aparatur desa, tetapi juga memperkaya khazanah penelitian dengan menyoroti implementasi inovasi desa di bidang kesehatan.

B. Tinjauan Teoritis

1. Kebijakan Publik

a. Pengertian Kebijakan Publik

Rahayu kusuma dewi (2016:15-16). Secara singkat, “kebijakan publik dapat di artikan sebagai aturan dalam bentuk tertulis dan keputusan resmi suatu organisasi yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, baik dalam lingkup publik maupun privat. Tujuan kebijakan publik adalah mengintegrasikan pengetahuan ke dalam suatu disiplin yang menyeluruh (*overarching*) untuk menganalisis pilihan publik untuk dan pengambilan keputusan sehingga ia ikut berperan dalam demokratisasi masyarakat.”

Istilah kebijakan bukan hal asing bagi kita, dalam kehidupan sehari-hari, istilah kebijakan sering digunakan secara luas, misalnya *Kebijakan Ekonomi Indonesia, Kebijakan Pendidikan Nasional, Kebijakan Impor Dan Eksport*, dan lain sebagainya. Kebijakan juga dapat dipakai untuk suatu yang lebih mikro, khususnya kebijakan dalam pemerintahan, seperti *Kebijakan Presiden, Kebijakan Menteri, Kebijakan Gubernur, Kebijakan Bupati/Walikota*, dan sebagainya.

Hayat (2018:13). Secara singkat, "Kebijakan publik adalah suatu keputusan yang dilakukan oleh pihak yang berwenang untuk kepentingan bersama."

Anderson dalam (Leo Agustino, 2016:16). "mendefinisikan kebijakan publik sebagai: *"A purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern."* Dalam bahasa yang sederhana, kebijakan publik adalah serangkaian kegiatan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan permasalahan atau sesuatu hal yang diperhatikan."

Menurut Thomas R. Dye dalam (Abdoellah dan Rusfiana, 2016:18) "menyatakan bahwa public policy itu adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan (whatever government chooses to do or not to do)."

Menurut Ealau dan Prewitt dalam (Suharto, 2016:16). "kebijakan publik adalah ketetapan yang berlaku yang dicirikan oleh pelaku yang konsisten dan berulang, baik dari pihak yang membuatnya maupun pihak yang menaatinya (yang kena kebijakan itu). Titmuass mendefinisikan kebijakan sebagai prinsip-prinsip yang mengatur tindakan yang diarahkan pada tujuan tertentu. Kebijakan senantiasa berorientasi pada masalah (*problem-oriented*) dan berorientasi pada tindakan (*action-oriented*)."

Tachjan dalam (Dian Suluh Kusuma Dewi,2022:1).”bahwa substansi kebijakan hakikatnya merupakan kesepakatan dari suatu keputusan dari beberapa rangkaian pilihan yang berhubungan satu sama lain. Kebijakan pada dasarnya ialah suatu kegiatan dari pemerintah yang mengatur kehidupan masyarakat maupun publik.”

Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan yang dijadikan pedoman atau petunjuk bagi setiap usaha untuk mencapai tujuan sehingga setiap kegiatan memiliki kejelasan dalam bergerak. Dengan kata lain, kebijakan adalah ketetapan yang membuat berbagai prinsip untuk mengarahkan cara-cara bertindak yang dibuat secara terarah dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu.

b. Aktor atau pelaku kebijakan

Orang-orang atau pelaku yang terlibat dalam perumusan kebijakan disebut aktor kebijakan. Adapun pelaku atau aktor dalam kebijakan publik yakni pelaku resmi dan pelaku tidak resmi. Kebijakan publik dipandang sebagai rancangan program yang dikembangkan pemerintahan dengan tujuan yang dimilikinya dan serta tahapan implementasi terhadap berbagai aktor yang terlibat. Aktor ini berasal dari pemerintah maupun masyarakat dan diidentifikasi dari kalangan birokrasi legislatif lembaga peradilan kelompok-kelompok penekanan dan organisasi komunikasi.

1) Pelakoresmi

Pelakoresmi ini bisam meliputi instansi-instansi pemerintah seperti lembaga legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Sebagai lem-

baga legislatif mempunyai wewenang untuk membentuk dan menyusun kebijakan. Lembaga legislatif ini mempunyai banyak suara yang awal kekuasaannya dari banyak pilihan dari publik yang memberikan suara. Tentu saja dalam perumusan kebijakan harus mengetahui keperluan dan tujuan yang hendak dicapai. Maka dari itu, kebijakan publik harus disusun dan diciptakan tanpa memberatkan berbagai pihak.

Setelah kebijakan disusun oleh lembaga legislatif, maka tugas selanjutnya dari lembaga eksekutif ialah melaksanakan dan mengeksekusi kebijakan dengan mengimplementasikan kepada masyarakat atau pihak publik lainnya. sedangkan lembaga yudikatif mempunyai wewenang untuk memberikann masukan dan penilaian serta mengawasi dalam pertimbangan sanksi apabila mempunyai kesalahan atau kekurangan dalam tahap implementasi pada sebuah kebijakan publik.

2) Pelaku Tidak Resmi

Pelaku ini berasal dari luar lembaga resmi atau pihak swasta maupun organisasi massa, partai politik dan juga warga negara. Pelaku ini tidak memiliki wewenang dalam pembuatan maupun penyusunan kebijakan. Aktor ini memiliki peran untuk ikut serta dalam melaksanakan kebijakan serta bisa memberikan masukan atau saran sesuai yang mereka inginkan. Tetapi apa yang warga sampaikan juga tidak memungkinkan bahwa saran yang diberi-

kanakanditerima.Pelakupembuatkebijakansudahmempunyai target sendiri dalam mengelola tugas-tugasnya.

c. Tahapkebijakanpublik

Rahayukusumadewi(2016:26-29)prosespembuatankebijakan publik dapat dibedakan dalam enam tahapan sebagai berikut :

1. Pendefinisianmasalah
2. Tahappenentuanagenda
3. Perumusanalternatifkebijakan
4. Pemilihanalternatifkebijakan
5. Pelaksanaankebijakan
6. Tahappenilaiankebijakan

d. Faktor-faktoryangmempengaruhikebijakanpublik

Faktorkondisilingkunganyangdipandangbisamemberikan pengaruhterhadappelaksanaankebijakan.Faktortersebutberasal dari faktor sistem politik, sistem ekonomi, dan nilai-nilai sosial budaya.Faktorterdapsistempolitikbersangkutandengantata pemerintahanmaupunadministrasinya. Banyak pihak yang memperhatikanbagaimanacaramengelola perumusankebijakan.Pemerintah bisamembentuksuatukebijakandenganbantuanpublikataumasyarakat dan kinerja oleh pemerintahjuga dinilai implemetasinya. Faktor ekonomi, biasanya pelaksanaan proses kebijakan ekonomiberadadipasardanjugaperusahaan.Merekamengimplementasikancarasepertilingkungannya.Sepertiekonomipasar

dipasar jual beli, dengan saling berinteraksi dan melakukan kegiatannya dengan kebijakan yang ditetapkan pada awal. Faktor lingkungan, yakni faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik yang bersangkutan dengan masyarakat atau publik. Faktor lingkungan ini lebih menyudut ke warga negara atau masyarakat yang lebih banyak.

2. Konsep Implementasi

a. Pengertian Implementasi

Deddy Mulyadi (2016:26).”Implementasi suatu kebijakan pada dasarnya adalah suatu perubahan atau transformasi yang bersifat multiorganisasi, dimana perubahan yang diterapkan melalui strategi implementasi kebijakan ini mengaitkan berbagai lapisan masyarakat.”

Apabila pengertian implementasi tersebut di rangkai dengan kebijakan publik, kata “ implemetasi” kebijakan publik dapat diartikan sebagai aktivitas penyelesaian atau pelaksanaan suatu kebijakan publik yang telah ditetapkan/disetujui dengan penggunaan sarana (alat) untuk mencapai tujuan kebijakan. Dengan demikian, dalam proses kebijakan publik, implementasi kebijakan merupakan tahap yang bersifat praktis dan dibedakan dari formulasi kebijakan yang dapat dipandang sebagai tahapan yang bersifat teoritis.

Menurut George C. Edwards III dalam (Subarsono, 2015:90)

.”Keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat

faktor utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi.”

Menurut Merilee S. Grindle dalam (Riant Nugroho 2016:201) “Keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh dua hal utama, yakni isi kebijakan (content of policy) dan konteks pelaksanaannya (context of implementation).”

Implementasi kebijakan merupakan proses dalam melaksanakan keputusan kebijakan (biasanya dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, putusan pengadilan, dan perintah eksekutif atau dekrit presiden dan/atau pernyataan politik pejabat.

Menurut Edwards dalam (Chazali,2016:216),”studi implementasi kebijakan adalah krusial bagi publik administration and public policy. Implementasi kebijakan adalah tahapan pembuatan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhi.”

Daniel A. Marmanian dan Paul A. Sabatier dalam (Rahayu Kusuma Dewi,2016:154).”mengemukakan bahwa implementasi adalah memahami apa yang sesungguhnya terjadi setelah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yakni kejadian dan kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman kebijakan Negara yang mencakup baik usaha untuk mengadministrasikannya dan menimbulkan akibat atau dampak nyata pada masyarakat atau kegiatan dan program yang sedang atau akan dilaksanakan.”

Pengertian implementasi apabila dikaitkan dengan kebijakan adalah bahwa sebenarnya kebijakan itu tidak hanya dirumuskan lalu dibuat dalam suatu bentuk positif seperti Undang-undang dan kemudian dibiarkan tidak dilaksanakan atau diimplementasikan,

tetapi sebuah kebijakan harus dilaksanakan atau diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan Implementasi kebijakan merupakan suatu upaya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dengan sarana-sarana tertentu dan dalam urutan waktu tertentu

Van Meter dan Van Horn dalam Joko Pramono, (2020:3).”mendefinisikanimplementasikebijakanpubliksebagai tindakan-tindakandalamkeputusan-keputusansebelumnya.Tindakan-tindakaninimencakupusaha-usahauntukmengubahkeputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupundalamrangkamelanjutkanusaha-usahauntuk mencapai perubahan besardankecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusankebijakanyangdilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.”

b. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi

Implementasi kebijakan adalah proses penerapan kebijakan yang telah dirancang oleh pemerintah atau organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Proses ini dipengaruhi oleh berbagai faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas dan keberhasilannya. Proses Implementasi kebijakan publik akan berhasil jika didalamnya ada komunikasi yang baik antar Implementator dengan pihak terkait, kesiapan sumber daya yang dimiliki, sikap birokrasi atau pelaksana yang mendukung serta struktur organisasi yang mendukung implementasi pelaksanaan kebijakan publik tersebut. Dalam implementasi kebijakan atau program terdapat dua kategori faktor yang bekerja serta mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi proyek yaitu (Budi Winarno, 2020:50):

1. Faktor pendorong (*facilitating conditions*)

Kondisi-kondisi atau faktor pendorong. Menurut Marwick, '*facilitating conditions*' for implementation, terdiri dari:

- 1) *Commitment of political leaders*, Komitmen Pimpinan Politik dalam praktik: utamanya komitmen dari pimpinan pemerintah, karena pimpinan pemerintah hakekatnya terdapat dalam pimpinan politik yang berkuasa
 - 2) *Organizational capacity*, Kemampuan organisasi: tahap implementasi program atau proyek, hakekatnya dapat dimaknai sebagai kemampuan guna melaksanakan tugas yang seharusnya, sebagaimana telah ditetapkan atau dibebankan pada salah satu unit organisasi. Kemampuan organisasi (*Organizational Capacity*) meliputi tiga unsur pokok: (i) kemampuan teknis; (ii) kemampuan untuk menjalin hubungan dengan organisasi lain yang beroperasi dalam sektor yang sama; (iii) adanya keinginan kuat untuk mengembangkan 'SOP': "*Standard Operating Procedures*" yaitu pedoman tata aliran kerja dalam pelaksanaan serta cara memecahkan permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan proyek di lapangan
 - 3) *The Commitment of implementers*, Komitmen pelaksana (implementers): salah satu asumsi yang kerap kali keliru, yakni apabila pimpinan telah siap untuk bergerak, maka bawahan akan mengikuti. Realitas bahwa kesediaan dan kemauan bawahan untuk mengerjakan dan melaksanakan (*to carry out*) suatu kebijakan yang telah disetujui bervariasi, serta di-pengaruhi oleh faktor psikologis, budaya serta birokratisme.
2. Faktor penghambat (*impending conditions*)
- Tidak ada suatu rencana pembangunan yang dalam pelaksanaannya terlepas dari pengaruh kekuatan politik, historis/sejarah ataupun nilai sosial budaya. Kondisi atau faktor penghambat. Adapun faktor-faktor yang secara teoritis menimbulkan hambatan terhadap implementasi program pembangunan, yakni:
- (a). Banyaknya 'pemain' (*actors*) yang terlibat. Semakin banyak pihak yang terlibat serta ikut mempengaruhi implementasi, maka semakin rumit komunikasi dalam proses pengambilan keputusan, sehingga semakin besar potensi terjadinya 'delay' hambatan dalam proses implementasi.
 - (b). Terdapatnya komitmen atau loyalitas ganda.
 - (1). Dalam banyak kasus, pihak yang terlibat serta ikut menentukan dalam proyek-proyek pembangunan, telah menyetujui suatu proyek, akan tetapi implementasinya mengalami penundaan karena adanya komitmen terhadap proyek atau program lainnya.
 - (2). Seringkali seseorang yang seharusnya berperan untuk keberhasilan proyek tersebut, tidak memiliki cukup perhatian, hanya semata-mata karena tidak memiliki cukup waktu, mengingat seluruh waktunya habis untuk tugas-tugas lainnya.

- (c). Kerumitan yang melekat pada proyek itu sendiri (*intrinsic-complexity*). Dalam hal ini berupa faktor teknis (*technical complexity*), pengadaan bahan (*supply complexity*) dan faktor perilaku pelaksanaan atau masyarakat (*behavioral complexity*).
- (d). Jenjang pengambilan keputusan yang terlalu banyak. Semakin banyak jenjang serta letak pengambilan keputusan, diperlukan untuk persetujuan sebelum rencana proyek dilaksanakan. Demikian pula pada tahap operasional, penyaluran serta kontribusi yang dibutuhkan, memerlukan banyak waktu, karena membutuhkan persetujuan dari berbagai pihak.
- (e). Faktor lain: Waktu dan perubahan kepemimpinan. Semakin panjang waktu yang diperlukan mulai tahap penyusunan rencana dengan pelaksanaan, maka semakin besar kemungkinan implementasi menghadapi hambatan, terlebih apabila terjadi perubahan kebijakan

1) Model-model implementasi kebijakan

1) Model Donald Van Meter dan Carl Van Horn

Model Donald Van Meter dan Carl Van Horn dalam Riant Nugroho (2016:219) Model ini mengandalkan bahwa implementasi berkerja secara dengan proses kebijakan. Menurut Van Meter & Van Horn yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan publik.

a) Standard dan sasaran kebijakan

Standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisasi. Apabila standar dan sasaran kebijakan kabur, maka akan terjadi multi interpretasi dan mudah menimbulkan konflik diantara para agen implementasi.

b) Sumber daya

Implementasi kebijakan perlu dukungan sumberdayabaiksumberdayamanusiamaupun sumberdaya non manusia.

c) Hubungan antar organisasi

Dalam banyak program, implementasi sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain. Untuk itu diperlukan koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu program.

d) Karakteristik agen pelaksana

Yang dimaksud karakteristik agen pelaksana adalah mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang semuanya itu akan mempengaruhi implementasi suatu program.

e) Kondisi sosial, politik, dan ekonomi

Variabel ini mencakup sumberdaya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan, karakteristik partisipan, yakni mendukung atau menolak bagaimana sifat opini publik yang ada di lingkungan, dan apakahelite politik mendukung implementasi kebijakan

f) Disposisi implementor

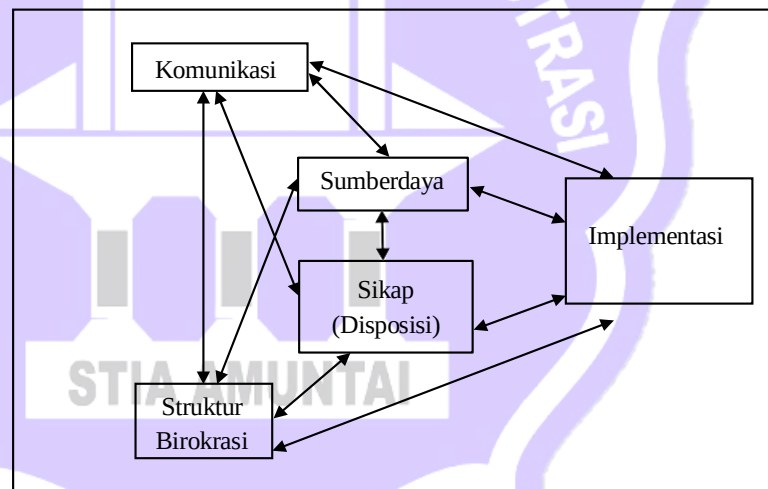
Disposisi implementor ini mencakup tiga hal yang penting, yakni: (a) Respons implementor terhadap ke-

bijakan, yang akan mempengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan, (b) kognisis, yakni pema-
hamannya terhadap kebijakan, dan (c) intensitas dispo-
sisi implementor, yakni preferensi nilai yang dimiliki
oleh implementor.

2) Teori George C. Edwards III

Gambar 2.2

Faktor Penentu Implementasi Menurut Edwards III



Sumber: Ag. Subarsono, 2021: 91

Dalam Subarsono (2015:90-92) pandangan Edwards III, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yakni komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi

a) Komunikasi

Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran.

b) Sumber daya

Walaupun kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan efektif. Sumber daya tersebut berupa wujud sumber daya manusia, yakni kompetensi implementor, dan sumber daya finansial. Sumber daya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa sumber daya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja.

c) Disposisi

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik.

seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif

d) Struktur Birokrasi

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (standard operating procedures atau SOP), SOP menjadi panduan bagi setiap implementor dalam bertindak

Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks. Ini pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

3) Teori Merilee S. Grindle

Dalam Subarsono (2015:93). "Keberhasilan implementasi menurut Merilee S. Grindle dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan dan lingkungan implementasi seperti pada gambar di bawah ini, variabel isi kebijakan mencakup: (a) sejauh mana kepentingan kelompok sasaran termuat dalam isi kebijakan, (b) jenis manfaat yang diterima oleh sasaran, (c) sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan, (d) apakah telah ada sebuah program sudah tepat, (e) apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementasinya dengan rinci, dan (f) apakah sebuah program didukung oleh sumber daya yang memadai."

Sedangkan variabel lingkungan kebijakan mencakup (a)seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan, (b)karakteristik institusi dan rejim yang sedang berkuasa, dan (c) tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.

3. KonsepPotensiDesa

Pembangunan sosial merupakan perubahan yang direncanakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan struktur sosial, nilai, dan norma yang berlaku.Pembangunan ekonomi bukan hanya peningkatan pendapatan per kapita, tetapi juga peningkatan taraf hidup manusia, pemerataan kesejahteraan, dan kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan. Pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui proses partisipatif yang menumbuhkan kesadaran, solidaritas,dan kemandirian dalam memenuhi kebutuhan mereka sendiri.

Menurut Permendagri No. 12 Tahun 2007 tentang pedoman penyusunan dan pendayagunaan data prodeskel. Potensi desa adalah keseluruhan sumber daya yangdimiliki atau digunakan oleh desa dan kelurahan baik sumber daya manusia, sumber daya alam dan kelembagaan maupun sarana dan prasarana untuk mendukung percepatan kesejahteraan masyarakat. Pada Permendagri No. 12 Tahun 2007 pasal 5 potensi desa itu terdiri atas sumberdaya alam (SDA), sumberdaya manusia (SDM), sumber daya kelembagaan, dan sarana dan prasana yang mana jika ke empat potensi ini digali maka akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

Peningkatan kesejahteraan melalui Baikisasi potensi desa menjadi solusi pemberdayaan masyarakat menuju kemandirian desa. Dengan kemandirian melalui Baikisasi potensi desa, kesejahteraan masyarakat desa diharapkan menjadi lebih terukur.

4. Konsep Program Inovasi Desa (AKUSAYANGTEGAR)

Program Inovasi Desa (PID) merupakan salah satu kebijakan strategis yang diluncurkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) sejak tahun 2017. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembangunan desa, memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat, serta mendorong lahirnya inovasi lokal yang sesuai dengan kebutuhan desa (Kemendesa PDTT, 2017).

Kebijakan tersebut memiliki dasar hukum yang jelas, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menyatakan bahwa desa mempunyai kewenangan dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengelola pembangunan secara mandiri berdasarkan prinsip partisipatif dan berkelanjutan (UU No. 6 Tahun 2014). Selain itu, implementasi PID juga diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang desa, serta permendesa PDTT Nomor 19 Tahun 2017 mengenai penetapan prioritas penggunaan dana desa tahun 2018 yang menjadi pijakan awal lahirnya PID.

Dalam konteks penelitian ini, Program Inovasi Desa (AKUSAYANGTEGAR) di Desa Telaga Itar Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong merupakan salah satu bentuk inovasi sosial yang difokuskan pada

upaya pencegahan stunting, pembinaan remaja, serta penguatan keluarga unggul. Program ini tidak sekadar menekankan pembangunan fisik desa, tetapi lebih menitikberatkan pada pembangunan manusia (human development) sebagai strategi peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Peningkatan kapasitas masyarakat dalam program AKU SAYANG TEGAR diwujudkan melalui kegiatan yang terintegrasi, antara lain pengelolaan pengetahuan lokal, pendampingan teknis masyarakat desa, serta penguatan kelembagaan. Fokus utama diarahkan pada bidang-bidang berikut:

- a. Pencegahan dan Penanganan Stunting, melalui edukasi gizi seimbang, pendampingan ibu hamil dan balita, serta pemeriksaan kesehatan rutin. Hal ini sejalan dengan prioritas pembangunan nasional dalam menurunkan angka stunting di pedesaan (Kemendesa PDTT, 2018).
- b. Pembinaan Remaja, dengan memberikan edukasi tentang kesehatan reproduksi, keterampilan hidup (life skills), dan pembentukan karakter kemandirian. Remaja dipersiapkan menjadi generasi sehat dan berdaya saing yang berperan penting dalam pembangunan desa (BKKBN, 2020).
- c. Penguatan Keluarga Unggul, melalui pelatihan pengelolaan ekonomi keluarga, pemberdayaan ibu dalam kegiatan produktif, serta pembinaan pola asuh anak. Keluarga diposisikan sebagai pondasi utama untuk mencetak generasi yang sehat, cerdas, dan berkualitas (UU

No.52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga).

Dengan demikian, Program Inovasi Desa (AKU SAYANG TEGAR) merupakan wujud nyata implementasi PID yang relevan dengan kebutuhan masyarakat Desa Telaga Itar. Program ini menitikberatkan pada pembangunan manusia, pencegahan stunting, pembinaan remaja, dan penguatan keluarga ungguh sebagai fondasi untuk mewujudkan desa yang sehat, mandiri, produktif, dan berkelanjutan.

5. Konsep Pendamping Desa

Desa yang maju, kuat, mandiri, demokratis dan sejahtera merupakan imajinasi tentang desa baru yang ditegaskan oleh UU Desa, sebagai arah perubahan desa yang berkelanjutan di masa depan. Perubahan desa itu terjai karena adanya pembelajaran, pengorganisasian maupun pendampingan. Pendampingan menjadi modalitas penting bagi perubahan desa. UU No.6/2014 telah memberikan amanat pemberdayaan melalui pendampingan desa. Adapun tujuan dari pendampingan desa meliputi:

- a. Meningkatkan kapasitas, efektifitas dan akuntabilitas pemerintahan desa dan pembangunan desa
- b. Meningkatkan prakarsa, kesadaran dan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan desa yang partisipatif
- c. Meningkatkan sinergi program pembangunan desa antar sektor
- d. MengBaikkan aset lokal desa secara emansipatoris

Berdasarkan Keputusan Menteri Desa Nomor 40 tahun 2021 tentang petunjuk teknis pendampingan masyarakat desa, pendampingan desa ada-

lah upaya meningkatkan kapasitas, efektivitas, dan akuntabilitas pemerintah desa, pembangunan desa, pembentukan dan pengembangan badan usaha milik desa dan atau badan usaha milik desa bersama-sama, peningkatan sinergitas program dan kegiatan desa, serta kerjasama antar desa untuk mendukung pencapaian SDGs desa.

Tujuan utama dari pendamping desa adalah mengawal implementasi UU Desa dan mendorong pelaksanaan UU Desa dengan cara memberdayakan masyarakat dan melahirkan kader-kader pembangunan desa yang baru. Berdasarkan Permendes Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa, rincian tugas dari pendamping desa adalah:

- a. Mendampingi desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan terhadap pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat
- b. Mendampingi desa dalam melaksanakan pengelolaan pelayanan sosial dasar, pengembangan usaha ekonomi desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pembangunan sarana dan prasarana desa, serta pemberdayaan masyarakat desa
- c. Melakukan peningkatan kapasitas bagi pemerintahan desa, lembaga kemasyarakatan desa dalam hal pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa
- d. Melakukan pengorganisasian di dalam kelompok-kelompok masyarakat desa
- e. Melakukan peningkatan kapasitas bagi kader pemberdayaan masyarakat desa dan mendorong terciptanya kader-kader pembangunan desa yang baru

- f. Mendampingi desa dalam pembangunan kawasan pedesaan secara partisipatif
- g. Melakukan koordinasi pendampingan di tingkat kecamatan dan memfasilitasi laporan pelaksanaan pendampingan oleh camat kepada pemerintah kabupaten/kota.

Pendamping desa memiliki tugas berat karena tidak hanya sebagai pendamping, tetapi juga sebagai pengawas atau pemantau terhadap pelaksanaan dana desa. Pengawasan yang dilakukan oleh pendamping desa dapat dilakukan sejak perencanaan sampai dengan pelaksanaan dana desa selesai

C. Kerangka Pemikiran

Program Inovasi Desa (PID) merupakan kebijakan yang diluncurkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) sejak tahun 2017 dengan tujuan meningkatkan kualitas pembangunan desa sesuai amanat Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Program ini dirancang agar desa mampu mengembangkan potensi lokal, meningkatkan produktivitas masyarakat, memperkuat kemandirian ekonomi, serta mempersiapkan pembangunan sumber daya manusia yang berdayasaing.

Dalam konteks penelitian ini, Program Inovasi Desa (AKUSAYANG TEGAR) sebagai Inovasi Sosial Dalam Menekan Angka Stunting di Desa Telaga Itar Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong merupakan salah satu bentuk inovasi sosial yang difokuskan pada pencegahan stunting, pembinaan remaja, dan penguatan keluarga unggul. Program ini tidak hanya berorientasi

pada pembangunan infrastruktur, melainkan menitik beratkan pada pembangunan manusia (*human development*) agar tercipta generasi sehat, cerdas, dan produktif.

Namun, implementasi program di tingkat desa tentu tidak lepas dari berbagai kendala maupun faktor pendukung. Untuk menganalisis keberhasilan implementasi tersebut, penelitian ini menggunakan teori George C. Edwards III (Rahayu kusuma dewi,2016:167) yang menekankan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat faktor utama, yaitu:

1. Komunikasi

Keberhasilan program sangat ditentukan oleh sejauhmana kebijakan dan tujuan program disosialisasikan kepada masyarakat. komunikasi mencakup penyampaian informasi tentang pentingnya pencegahan stunting, pembinaan remaja, dan peran keluarga dalam membangun kualitas generasi.

2. Sumber Daya

Implementasi program membutuhkan ketersediaan sumber daya, baik berupa dana, sarana prasarana, maupun kualitas sumber daya manusia. Pada sumber daya ini mencakup ketersediaan tenaga kesehatan, kader desa, serta dukungan dana dari pemerintah desa maupun pihak terkait.

3. Disposisi atau Sikap Pelaksana

Sikap dan komitmen aparat desa serta pelaksana program sangat memengaruhi keberhasilan implementasi. Jika aparat desa memiliki komitmen kuat dalam mendukung program, maka kegiatan pencegahan stunting, pembinaan remaja, dan penguatan keluarga dapat berjalan baik.

4. Struktur Birokrasi

Keberhasilan implementasi juga dipengaruhi oleh adanya struktur organisasi yang jelas, prosedur yang sederhana, serta koordinasi antar pelaksana program. struktur birokrasi mencakup peran pemerintah desa, kader kesehatan, tokoh masyarakat, dan lembaga desa lain yang harus bekerja secara terkoordinasi.

Dengan demikian, melalui teori George C. Edwards III (Rahayu kusuma dewi,2016:167),”implementasi Program Inovasi Desa (AKU SAYANG TEGAR) di Desa Telaga Itar dapat dianalisis secara mendalam, baik dari sisi komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana, maupun struktur birokrasi. Analisis ini akan membantu mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat implementasi, sekaligus memberikan gambaran mengenai sejauh mana tujuan program dalam pencegahan stunting, pembinaan remaja, dan penguatan keluarga unggul dapat tercapai.”

Berdasarkan uraian kerangka pemikiran tersebut, maka dapat digambarkan model kerangka pemikiran penelitian ini sebagai berikut:



Gambar 2.2

Kerangka Pemikiran

